

TESIS

**KEBERTAHANAN AKTOR ETNIS TIONGHOA PADA PEMILIHAN
LEGISLATIF 2019 DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan Oleh:

**ASFAR MUTAALY BARELLY
E052201001**



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

KEBERTAHANAN AKTOR ETNIS TIONGHOA PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

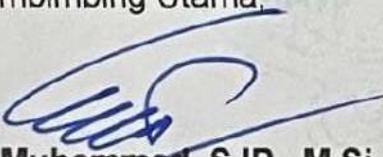
Asfar Mutaaly Barelly

E0052201001

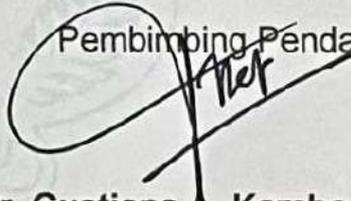
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **1 JUNI 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

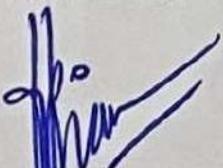
Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Muhammad, S.I.P., M.Si.
Nip. 19710917 199703 1 001

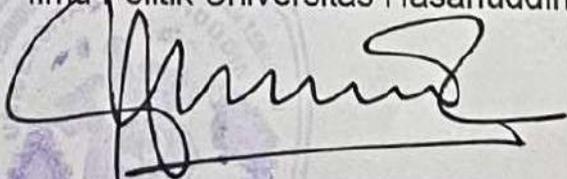
Pembimbing Pendamping,


Dr. Gustiana A. Kambo, S.I.P., M.Si.
Nip. 19730813 199802 2 001

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,


Dr. Ariana Yunus, S.I.P., M.Si.
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 19651109 199103 1 008

PERNYATAAN KESLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASFAR MUTAALY BARELLY

NIM : E052201001

Program Studi : ILMU POLITIK

Jenjang : S-2

Menyatakan dengan ini bahwa tesis yang berjudul "KEBERTAHANAN AKTOR ETNIS TIONGHOA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI KOTA MAKASSAR" merupakan hasil karya penulis dan bukan plagiat atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar 3 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown, partially obscured by a black ink signature. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'DAPAT BERKUALITAS', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'PT. 353A.1X700803054' is visible at the bottom of the note.

ASFAR MUTAALY BARELLY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tak ada yang patut saya ucapkan atas pemberian rahmat-Nya selain pengabdian dan penyembahan hanya kepada-Nya. Salam penghormatan bagi Nabi-Nabi terdahulu para pembawa pencerahan risalah keteladanan, terkhusus Muhammad SAW sebagai utusan penutup dan penyempurna segala ajaran sehingga penyusunan tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister pada program studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda almarhum Alwi Syam Bareilly dan Ibunda Jawariah yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, serta tidak pernah lelah dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga menjadi orang yang berguna yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan. Keselamatan Dunia Akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya. Juga kepada kakak-kakakku tercinta terima kasih atas segala support baik moril, materil serta motivasi yang selama ini diberikan kepada penulis, semoga segala kebaikan senantiasa menyertai. Serta seluruh keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk doanya kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan pernah tercipta tanpa dorongan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah rela memberikan segala bantuan, baik itu bantuan moral maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Kepada bapak Dr . Phil. Sukri, M.Si. selaku Wakil Dekan I, Terima Kasih sudah banyak membantu memperlancar segala proses pengurusan berkas ujian skripsi.
4. Dr. Ariana Yunus, S.IP., M. Si selaku Ketua Magister Ilmu Politik ilmu sosial dan ilmu politik Univeristas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu dan arahan yang telah diberikan selama ini dan Ibu Dr. Gustiana A. Kambo selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktu, tenaga dan arahan yang telah diberikan selama ini.
6. Bapak Drs. H. A. Yakub, Ph.D. Selaku Dosen Penguji
7. Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si. Selaku Dosen Penguji
8. Dosen Program Studi Ilmu Politik, Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman-pengalaman kepada

penulis. Semoga segala yang diberikan dapat bernilai ibadah kepadaNya.

9. Staf Jurusan Ilmu Politik yang dengan baik dan sabar dalam melayani penulis selama kuliah.
10. Seluruh dosen dan staf di lingkungan FISIP dan lingkungan Universitas Hasanuddin.
11. Teman-teman Sospol angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para informan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
13. Seluruh keluarga, rekan, sahabat dan handai taulan yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap tesis ini agar dikemudian hari penulis dapat membuattulisan-tulisan yang lebih baik.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Makassar, 17 juni 2022

ABSTRAK

Asfar Mutaaly. *Kebertahanan Aktor Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kota Makassar.* (Di bimbing Oleh Muhammad dan Gustiana A. Kambo).

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena politik etnis di Kota Makassar dengan menjelaskan pada kerangka minirotas etnis dan kemampuan minoritas etnis bertahan dalam kompetisi etnik pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Makassar serta mengidentifikasi eksistensi etnik Tionghoa Dan Hambatan Aktor etnis dalam mempertahankan eksistensinya pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskripsi pemaknaan kata-kata lisan dan tulis serta tingkah laku teramati dari subyek penelitian dengan menggunakan teori politik etnis (Kellas), modal sosial (Putnam), arti aktor politik (Mc nair), Jaringan dan strategi aktor Melalui analisis SWOT.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh aktor etnik Tionghoa dalam membangun kebertahanannya dilakukan dengan sosialisasi secara intens sebagai dasar pelaksanaan survei terhadap aktor serta berupaya membangun kebertahanan dengan merawat ketokohan aktor etnik Tionghoa dalam memaksimalkan potensi dirinya melalui analisis SWOT. Dalam tataran hambatannya yang dihadapi mereka berada pada stigma minoritas etnik yang mengarah yang mengarah pula pada minoritas agama termasuk minoritas kepemilikan umum dari calon legislatif yang merupakan aktor etnik Tionghoa, menurunnya Kepercayaan masyarakat pada aktor etnis Tionghoa didasarkan pada adanya calon legislatif yang muda dan belum berpengalaman dalam pemerintahan, adanya pemanfaatan kekuatan finansial dalam memobilisasi masyarakat pemilih, fenomena korupsi pada anggota legislatif, munculnya kampanye hitam yang tajam saat pemilu, Kompetisi antar aktor antar etnik yang disebabkan, kompetisi internal keanggotaan partai politik, kompetisi dalam perbedaan agama dan pengaruhnya terhadap masyarakat pemilih, dan kampanye yang menghadirkan isu yang saling bertentangan.

Kata kunci: kebertahanan, aktor politik, minoritas etnis, etnis tionghoa, kompetisi

ABSTRACT

ASFAR MUTAALY. *The survival Of Chinese Ethnic Actor in 2019 Legislative Election in Makassar City (Supervised by Muhammad and Gustiana A. Kambo).*

The research aims to analyse the ethnic political phenomenon by elaborating the ethnic minority frame work and the minority ability to survive in the athenic competition and in 2019 legislative election. The research also indentifies the efforts of the Chinese ethnic actors to maintain their existence, and the ethnic actor' obtacles in maintaining their existence in 2019 legislative elction in Makassar City.

The research used the qualitative approach to produce the descriptive data to interpret the spoken and written words, and the behaviors could be observed from the people investigated using Kellas ethnic political theory, Putnam social Capital, McNair's Political actor meaning, actor' networks and strategies in SWOT analysis.

The research result indicates that the Chinese ethnic actor' efforts in building their resilience are conducted by the intense socialisation as the basic for the survey implementation on the ethnic actors, and efforts to build the resilience by nurturing the Chinese ethnic actor' characters in maximasing their potensials through SWOT analysis. The obtacles encountered are in the ethnic minority stigma which also leads to religious minority including the age ownership minority of the legislative candidates who represent the Chinese ethnic actors and the public trust decline towards the Chinese ethnic actor. These are based on the existence of legislative candidates who are young and inexperienced in the governmentthe use of the financial power mobilizing the voting community, as well as the sharp black campaign during the general election. The competition of the inter - ethnic actor is caused by the religious differences and the influence on the voting community, campaign competition presenting the mutual conflicting issues.

Keywords: Survival, political actor, ethnic minority, Chinesse ethnic, competition

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kegunaan Teoritis.....	10
1.6. Kegunaan Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Politik Etnis	11
2.2. Konsep Modal Sosial	16
2.3. Arti Aktor dan Interaksinya dalam Arena Politik	21
2.4. Teori Jaringan Aktor.....	23
2.5. Strategi Politik Aktor.....	30
2.5.1. Memaksimalkan Survei dalam upaya mengenal suara Pemilih	31
2.5.2. Memaksimalkan Potensi diri melalui analisis SWOT untuk mengenal kemampuan aktor.....	34
2.6. Kerangka Pemikiran.....	38
2.7. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
3.2. Lokasi Penelitian.....	47

3.3.	Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti	48
3.4.	Penetapan Informan.....	48
3.5.	Sumber Data.....	50
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7.	Teknik Analisis Data	52
3.8.	Tahap-Tahap Penelitian dan Jadwalnya.....	55
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		57
4.1.	Sejarah Masuknya Etnik Tionghoa Di Kota Makassar.....	57
4.2.	Etnis Tionghoa Dalam Politik Indonesia	60
4.3.	Hasil Pemilihan Anggota Legislatif Kota Makassar Periode 2019-2024.....	62
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		64
5.1.	Upaya mempertahankan Eksistensi Etnis Tionghoa	64
5.1.1.	Melakukan Sosialisasi Tiap Dapil Untuk Memaksimalkan Hasil Survei.....	66
5.1.2.	Merawat Ketokohan Dalam Memperkuat Potensi Diri Aktor.....	74
5.2.	Hambatan Aktor Etnik Tionghoa Dalam Mempertahankan Eksistensi Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Makassar.....	84
5.2.1.	Minoritas Etnik	85
5.2.2.	Turunnya Kepercayaan Masyarakat.....	87
5.2.3.	Kompetisi Antar Aktor Antar Etnik.....	91
5.3.	Implikasi Teoritik	95
BAB VI PENUTUP.....		114
6.1	Kesimpulan	114
6.2	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN		120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perolehan Suara Aktor Etnis pada Pemilu Legislatif

Tabel 2.1. Pola Politik Identitas Etnis

Tabel 4.2. Daftar anggota terpilih DPRD Kota Makassar periode 2019-2024

Tabel 5.1.1. Perolehan kursi daerah pemilihan (Dapil I) Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Rappocini

Tabel 5.2.3 Caleg DPRD Kota Makassar Tahun 2019 dari Etnis Tionghoa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem politik banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satu diantaranya adalah partisipasi politik dalam sebuah negara yang demokratis karena sistem politik yang demokratis tidak akan ada artinya tanpa adanya partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih wakil atau pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*) (Budiardjo, Miriam 2008:367). Partisipasi politik mempunyai hubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan rakyat dalam partisipasinya menunjukkan kualitas kepentingan mereka, misalnya kepentingan rakyat dapat diukur dalam keterlibatan mereka pada politik elektoral atau pemilu.

Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang penting karena sistem pemilu adalah sarana rakyat. Sistem pemilu adalah metode yang didalamnya terdapat suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan dan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.

Keterlibatan rakyat dalam sistem politik dapat dibuktikan dengan munculnya representasi aktor pada pemilu, seperti tokoh masyarakat, aktor

dari berbagai etnis dan latar belakang sosial yang berpartisipasi dalam kepengurusan partai politik dan menjadikan partai politik sebagai kendaraan politik sebagai syarat untuk maju pada pemilihan umum legislatif (Pileg). Aktor politik yang berupaya menjadi seorang kandidat dalam kontestasi pemilu mensyaratkan modalitas politik serta kapabilitas yang cukup agar dapat di usung oleh partai politik, sehingga para penentu kebijakan partai memberikan rekomendasi sebagai tiket untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi elektoral atau pemilu. Apalagi, dalam banyak hal, sosok yang dicalonkan oleh pengurus partai di tingkat daerah biasanya harus mendapat persetujuan dari pengurus partai di tingkat pusat. Hal itu menjadi gambaran bahwa persetujuan partai politik dalam bentuk rekomendasi partai memiliki muatan kepentingan terhadap aktor politik untuk terlibat pada kontestasi elektoral. Kapabilitas dan elektabilitas seorang aktor dalam bentuk modalitas politik tentunya dipandang penting oleh partai politik untuk keberlangsungan dimana partai politik berorientasi.

Pengelolaan modalitas sosial aktor politik dalam kontestasi membutuhkan beberapa cara untuk memperkenankan potensi yang dimiliki oleh calon, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai bagian dari strategi politik aktor. Strategi politik adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan politis (Schroder, 2010, p. 27). Dalam prosesnya, penyusunan strategi perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan strategi lawan. Strategi yang dipilih harus melihat profil, program, kinerja, serta kemampuan dari kandidat itu sendiri. Pada ranah politik, strategi dilakukan

untuk memperoleh posisi pada kekuasaan, sehingga diperlukan strategi yang dapat mempengaruhi proses menuju kekuasaan. Dalam kontestasi pemilihan legislatif, strategi politik yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar dapat mempengaruhi mereka untuk memberikan hak pilihnya. Peran individu atau calon legislatif dalam sebuah penyusunan strategi, terutama dalam pengorganisasian. Masyarakat akan mempertimbangkan sosok aktor yang bertarung dalam pemilihan legislatif berdasarkan penilaian individu melalui tiga unsur, yakni popularitas, citra, serta dukungan internal (Schroder, 2010, pp. 102-104).

Strategi politik pada pemilu legislatif di kota Makassar khususnya etnis tionghoa masih membutuhkan telaah lebih dalam, melihat bagaimana perjalanan sejarah etnis tionghoa di kota Makassar mengalami pasang surut konflik horizontal antar etnis pada tahun 1998 yang membuat etnis tionghoa menjadi kelompok masyarakat termarjinalna dari kelompok masyarakat lainnya di kota Makassar, situasi memberi dampak yang kurang menguntungkan baik secara fisik dan non fisik dalam interaksi mereka baik di internal etnik tionghoa maupun eksternal etniknya.

Interaksi sosial dalam kontestasi pemilu legislative di kota Makassar, dilakukan dengan proses konsolidasi. Tindakan ini berbarengan dengan proses politik identitas, yang diawali dengan adanya pemaknaan yang sama atas persamaan, khususnya persamaan nasib, territorial dan agama.

Dalam berbagai hal, dinamika politik dikota Makassar, dapat dimaknai sebagai ruang kebebasan antar calon untuk penunjukkan

kekuatan finansial sekaligus sebagai bargaining position (tawar menawar) antara pemerintah dengan calon yang mengakibatkan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami keterlibatan etnis tionghoa dalam berbagai aktifitas politik di kota Makassar

Berbagai opini muncul dalam masyarakat kota Makassar bahwa Aktor etnis tionghoa melibatkan diri secara jauh dalam politik praktis banyak dipengaruhi peristiwa masa lalu yang mengakibatkan etnis tionghoa mau tak mau melakukan konsolidasi politik melalui jaringan aktor yang berada dalam lembaga perhimpunan tionghoa dan paguyuban Sosial marga tionghoa Indonesia Sulawesi-selatan baik dikota Makassar maupun provinsi Sulawesi-selatan. Kondisi ini memungkinkan berlangsungnya konsolidasi pada pola politik etnik yang berkelanjutan.

Interaksi masyarakat etnis tionghoa dan warga kota Makassar berangsur membaik sejak keterlibatan beberapa aktor etnis ini dalam pemilihan umum, khususnya pada pemilihan umum legislatif. Terdapat 7 aktor-aktor etnis yang maju pada pemilu legislatif 2014 kota Makassar yang tersebar di beberapa dapil (daerah pemilihan) diantaranya Arwan Chayadi yang merupakan Caleg DPRD Provinsi, Melani simon caleg DPRD Kota makassar, William lauren Caleg DPRD Kota Makassar, Eric horas Caleg DPRD Kota Makassar, Edward horas Caleg DPRD Provinsi dan Herman Sunarli dan tjiko Wihara.

Sejak pemilu tahun 2014-2019 dan pemilu 2019-2024 Perolehan kursi Aktor etnis tionghoa mengalami peningkatan. Penambahan perolehan suara aktor dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 1.1. Perolehan Suara Aktor Etnis pada Pemilu Legislatif

Aktor terpilih priode 20114-2019	Aktor terpilih 2019-2024	Makassar/profivinsi	KET
Eric Horas (6.063 suara)	Eric horas (4,201 suara)	DPRD Makassar dapil 1	Penurunan
Edward Wijaya Horas (12.536)	Edward Wijaya horas (13.183 suara)	DPRD Provinsi dapil Makassar 1	Kenaikan
William lauren (3.769 suara)	William (2,826 suara)	DPRD Makassar dapil 2	Penurunan
	Andre Prasetyo Tanta (22.524 suara)	DPRD Provinsi dapil Makassar 1	Partisipasi baru

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan

Peningkatan partisipasi etnis tionghoa dalam pemilu legislatif di wilayah pemilihan kota Makassar yaitu ditandai dengan terpilihnya Andre Prasetyo Tanta yang menjadi symbol eksistensi etnis, Andre PrasetyoTanta masuk sebagai kader partai nasdem dan maju pada kontestasi pileghingga terpilih menjadi anggota DPRD provinsi pada daerah pemilihan (Dapil) Makassar 1 priode 2019-2024 yang wilayah pemilihannya meliputi Kecamatan Makassar, Rappocini, Ujungpandang, Tamalate, Mariso, Mamajang, Bontoala, Tallo Ujung tanah, Wajo.

Kehadiran etnis Tionghoa dalam arena politik Kota Makassar bukan hal yang baru. Kontestasi pemilihan legislatif (pileg) 2019 pada wilayah pemilihan Kota Makassar ada 5 dapil dengan 50 kursi DPRD kota yang di perebutkan dan 2 dapil Provinsi untuk DPRD provinsi Sulawesi Selatan, melihat data KPU Perolehan kursi 2014 dan 2019 kota Makassar dapil 1 dan 2 dimana dapil 1 meliputi kecamatan Makassar, Rappocini dan Ujung

pandang serta dapil 2 meliputi kecamatan Wajo, Ujung tanah, Tallo dan Bontoala, kedua daerah pemilihan tersebut sebahagian penduduknya berasal dari etnis tionghoa bermukim dan melakukan aktifitas usaha pada wilayah tersebut. Pada data pemilu banyak partai yang memberikankan rekomendasi aktor etnis sebagai kendaraan politik, seperti halnya partai Gerindra, PDI, PKB, NASDEM, melalui partai tersebut aktor etnis berjuang mempertahankan posisi di partai untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Pada konteks pemilihan legislatif di kota Makassar pemilih dapil 1 dan dapil 2 selalu melahirkan representasi calon dari etnis tionghoa, melalui data pusat statistik 2014 terdapat 110 ribu warga tionghoa yang akan di perebutkan para caleg Etnis tiong hoa di kota makassar, salah satunya adalah Eric Horas yang maju melalui partai Gerindra yang dimulai pada awal pemilu 2014 bersama saudaranya Edward Horas, pada pemilihan legislatif saat itu keduanya terpilih menjadi anggota DPRD, dimana hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Erik Horas terpilih sebagai anggota DPRD kota Makassar dan saudaranya Edward horas juga terpilih sebagai anggota DPRD provinsi pada wilayah pemilihan yang sama yaitu kota Makassar, proses inilah yang perlu ditelaah lebih dalam bagaimana kebersamaan yang dilakukan aktor Eric dan Edward (Horas bersaudara) ini menjalankan proses pencalonan hingga mendapatkan kursi DPRD yang sampai saat ini masih tetap dapat di pertahankan.

Proses mempertahankan kursi DPRD oleh aktor etnis tionghoa juga terjadi di dapil yang berbeda yaitu William Lauren yang maju dari partai PDIP. William Luran yang merupakan aktor etnis tionghoa menjalankan proses pencalonannya menjadi anggota DPRD kota Makassar dimulai pada tahun 2014 hingga 2019 saat ini tentunya berbeda dengan proses yang dilalui Eric dan Edward (horas besaudara) begitu juga dengan perolehan suara pada tahun 2014 dengan perolehan suara pada tahun 2019, Namun bila konsolidasi antar etnis dalam menjalankan proses pemilu bisa saja terjadi dengan melihat wilayah pemilihan yang sama antara calon legislatif kota dan provinsi. Proses politik Aktor-aktor etnis di kota Makassar inilah yang menjadi simbol etnis tionghoa di daerah pemilihan di Kota Makassar.

Berbagai strategi dilakukan oleh aktor politik untuk memenangkan pemilihan, diantaranya menggerakkan seluruh tim sukses untuk mempersiapkan para calon legislatif, serta merancang strategi kampanye. Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum(pemilu). Bagi para calon legislatif, strategi kampanye merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan, karena salah menentukan strategi kampanye bisa mengakibatkan kegagalan dalam mendapatkan dukungan suara pada pemilu.

Pada umumnya aktor politik etnis Tionghoa yang terlibat sebagai politisi adalah mereka yang mapan dari sisi ekonomi, sehingga orientasi

mereka di kancah politik bukan untuk mencari sumber ekonomi. Adapun motivasi perilaku aktor Politik etnis Tionghoa ini terjun ke politik praktis adalah: (a). eksistensi, pengabdian dan pelayanan (b). kehendak keterwakilan dalam pemerintahan agar dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak dianggap lagi sebagai kelompok masyarakat kelas dua (the second class). (c). Sebagai penguat dunia bisnis (d). Menghapuskan diskriminasi dalam segala bidang baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga tercipta keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. (e) Mengharapkan hidup harmonis dengan masyarakat lainnya dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Etnisitas yang terbangun atas dasar kesamaan etnis dilihat dari keberagaman bentuk gerakan sosial dalam masyarakat. Melalui etnisitas, konsolidasi identitas terbangun dan dibangun. Bagaimana peran aktor dan kelompok masyarakat etnis tionghoa memaksimalkan modal politik dan membangun relasi untuk dapat dijalankan sehingga eksistensi keberlangsungan etnis sampai saat ini tetap berlangsung. Saluran apa yang digunakan para aktor etnis dalam membangun politik.

Penelitian ini berorientasi untuk menggambarkan bagaimana aktor etnis memaksimalkan potensinya dalam mendulang suara pada pemilihan legislatif, termasuk bagaimana upaya mereka mampu bertahan dengan calon lainnya diluar etniknya. Hal ini sebagai bentuk harapan masyarakat etnis tionghoa kepada aktor tersebut, yang memperoleh kursi di DPRD Kota Makassar dan provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan gambaran yang telah di uraikan sebelumnya maka penulis akan mengangkat judul Tesis dengan judul "Kebertahanan Aktor Etnis Tionghoa Dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif 2019 Kota Makassar".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana upaya aktor etnis Tionghoa mempertahankan eksistensi pada Pemilihan legislatif 2019 di Kota Makassar?
- 2) Hambatan aktor etnis dalam mempertahankan eksistensi pada pemilihan legislative 2019 di Kota Makassar

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis serta memahami fenomena etnisitas pada kebertahanan aktor etnis pada pemilu lesilatif 2019 kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi bagi pengembangan dan wawasan ilmu poliitk baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, Berguna untuk mengembangkan kemampuan berfikir dari ide-ide atau gagasan yang akan dituangkan.

1.5. Kegunaan Teoritis

- a) Mengkaji secara ilmiah mengenai Kebertahanan Etnis Tionghoa dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019 Kota Makassar.
- b) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan strategi aktor etnis Tionghoa dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019 Kota Makassar.

1.6. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan pengetahuan bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.
- b) Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar magister ilmu politik.
- c) Membantu para peminat politik memahami realitas politik Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis menguraikan beberapa konsep yang mendasari penelitian ini sehingga menjadi landasan penulis dalam memahami tema penelitian tentang keberintahan aktor etnis pada pemilu legislatif 2019 di kota Makassar, adapun beberapa konsep yang digunakan: politik etnis, konsep modal sosial, pemahaman tentang aktor dan teori jaringan aktor, serta strategi politik.

2.1. Politik Etnis

Penggunaan etnis sebagai basis perebutan kuasa, menjadi fenomena yang seringkali terjadi di berbagai daerah. Hal ini memberi warna pada perbedaan antara etnis, suku, agama dan ras, yang pada hakekatnya itu hanyalah cara-cara para elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa dalam hal penempatan tataran birokrasi, etnisitas juga menjadi pertimbangan dalam menentukan seseorang pada posisi jabatan yang sangat strategis.

Wacana mengenai politik etnis kembali menguat semenjak reformasi di Negeri ini digulirkan. Hal ini seiring dengan kebijakan desentralisasi politik yang dijalankan oleh pemerintah. Era reformasi telah menghantarkan bangsa ini ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi ternyata telah melahirkan kembali dan memperkuat kesadaran etnis. Gerakan politik etnisitas ini semakin jelas wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar

menggunakan isu ini dalam power-sharing. Praktik politik etnis secara nyata menunjukkan bahwa betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik.

Seperti yang diungkapkan oleh Muhtar Haboddin (2007; 111) yang mengatakan bahwa: "Politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara "kami" dan "mereka", "saya" dan "kamu" sampai pada bentuknya yang ekstrim "jawa" dan "luar jawa" atau "islam" dan "kristen". Dikotomi oposisional semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh ataupun rival politiknya yang notabene "kaum pendatang". Sedangkan ilmuwan Rothschild (1981); mengutarakan *a conceptual framework* politik etnik, adalah (1) membuat seseorang mengetahui dan sadar akan keterkaitan politik dengan nilai-nilai budaya etnik mereka dan sebaliknya, (2) untuk mendorong perhatian mereka mengenai keterkaitan kedua hal tersebut, (3) untuk memobilisasi mereka kedalam kesadaran etniknya, dan (4) mengarahkan perilaku mereka kedalam aktivitas arena politik pada basis kesadaran, perhatian, kesadaran kelompok. Politisasi etnis seperti itu bisa meningkatkan, memperlambat, atau menghapuskan keadaan integrasi politik, dapat melegitimasi atau delegitimasi sistem politik mereka, dan menstabilkan pemerintahan.

Menurut Kellas, Politik etnis mengacu pada politik kelompok etnis atau minoritas etnis yang tidak memiliki teritori sendiri yang tujuannya untuk pencarian proteksi dan kemajuan bagi kelompoknya serta kebebasan berekspresi dan bersosialisasi. Dalam konteks ini, kelompok minoritas

menjadi subordinat kelompok mayoritas yang mendominasi sosialitas hubungan, maka minoritas inilah yang menjadi etnis, menjadi unik, atau bahkan terasing dan aneh. Gerakan politik etnis pada awalnya berorientasi untuk kekuasaan, penguasaan wilayah, penguasaan sumber-sumber ekonomi, bahkan penguasaan manusianya (etnis lain). Selanjutnya pada era politik modern sekarang ini politik etnis mengikuti arah perkembangannya sehingga muatan-muatan ideologis muncul. Kesadaran etnis kemudian menjadi besar dan menjelma menjadi suatu kesadaran suku dan wilayah yang lebih luas mengarah kepada bangsa.

Klause Van Beyme menganalisis dan mencoba melihat wacana gerakan sosial politik yang didasarkan atas politik etnis dalam beberapa tahap perkembangannya mulai era pramodern, modern, dan postmodern. Dimana ia menggambarkan pola-pola gerakan, motivasi, dan tujuan yang hendak dicapainya maka ia mengungkapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pola Politik Identitas Etnis

MODEL TEORI	POLA KETERANGAN	POLA AKSI	TUJUAN GERAKAN
Pra Modern	Perpecahan Objektif (dimana ada perpecahan fundamental pasti ada gerakan sosial yang menyeluruh)	Mobilisasi secara ideologis atas inspirasi pemimpin	Perampasan Kekuasaan
Modern	Pendekatan Kondisional (keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk di mobilisasi).	Keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah	Pembagian Kekuasaan
Postmodern	Gerakan tumbuh dari dinamikanya sendiri. Protes muncul dari berbagai macam kesempatan individual. Tidak terdapat satu pecahan yang dominan		Otonomi

Sumber: Ubed Abdilah S Politik Identitas Etnis

Kategorisasi gerakan politik etnis yang dipaparkan oleh Van Beyme di atas dapat diterapkan dalam menganalisis implementasi pola-pola gerakan politik etnis. Wacana politik etnis pada tahap pramodern merupakan kelompok-kelompok yang terpecah berdasarkan nasionalisme etnis yang kental, belum mengenal kebudayaan, dalam arti mengenal sesuatu dengan apa adanya. Tujuan dari gerakan politiknya adalah

kekuasaan atau dominasi atas kelompok etnis yang lain, hal ini dilakukan untuk produksi demi kelangsungan hidup (*tribalisme*). Peran pemimpin dalam proses ini sangat dominan, paternalisme memegang peran penting dalam pembentukan komunitas dan masyarakatnya sebagai sebuah koloni.¹

Dalam tataran pemahaman mendasar, politik etnik dikelompokkan dalam tiga perspektif, yaitu primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. *Pertama*, perspektif primordialisme memandang bahwa kelompok etnik berakar pada kesadaran kultural yang diperoleh dari bekerjanya institusi paling dasar seperti keluarga, agama, bahasa, kewilayahan, kebudayaan dan organisasi sosial yang disadari secara objek sebagai hal yang “*given*” yang diwariskan secara turun temurun. Dalam hal ini, etnisitas berkembang sebagai lanjutan dari suatu kelompok etnik melalui *self contained process*.

Kedua, perspektif konstruktivis, dalam perspektif ini suatu identitas etnik dikonstruksi, diciptakan secara aktif, dipelihara, diberi penguatan oleh individu dan kelompok untuk memperoleh akses sosial dan politik. Mereka terlibat dalam politik dengan membangun simbol-simbol etnik yang didasarkan atas alasan praktis sebagai sarana efektif untuk menimbulkan dukungan emosional dari segenap pihak.

¹ Klaus Van Beyme. Dalam bukunya Ubed Abdilah S, Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Indonesiatara. 2002. Hal.146

Ketiga, perspektif instrumentalis lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok sosial disusun atas dasar etnisitas. Perspektif ini memandang etnisitas sebagai sesuatu yang membantu individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Hal ini terjadi pada kelompok minoritas yang berada pada posisi *extremely poor* dan/atau *powerless* sehingga membutuhkan kekuatan untuk promosi yang lebih tinggi. Dalam arti bahwa etnisitas merupakan respon atas perlakuan yang pilih kasih.

2.2. Konsep Modal Sosial

Modal sosial atau *social capital* merupakan satu terminologi baru yang dikembangkan oleh ahli-ahli sosial. Hal ini akan lebih efektif digunakan jika diantara ketiganya ada interaksi sosial atau hubungan sosial. Modal sosial pada umumnya selalu dikaitkan dengan Bourdieu walaupun ada pemikir yang mengemukakan itu seperti: Coleman dalam buku *Foundations of Social Theory* (1944) dan R.D. Putnam melalui buku *Democracy work: Civic Traditions in modern Italy* (1993). Diantara pemikir itu, harus diakui Bourdieu lah sebagai tokoh yang mempopulerkan konsep modal sosial yang kemudian dibahas oleh Coleman dan Putnam.

Bourdieu menempatkan istilah ini pada suatu arah dengan melihat modal sosial sebagai aset yang dimanfaatkan oleh sekelompok elit khususnya yang mereka memiliki modal ekonomi (*financial*) dan modal budaya terbatas. Untuk itu Bourdieu memberikan contoh bangsawan

prancis dalam menjalankan profesinya.² Modal sosial secara sederhana merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan bersama. Marijan berpendapat bahwa modal sosial yaitu kedekatan calon kepada masyarakat pemilih, yang akan memilihnya dalam pergelaran pemilihan. Modal sosial terdiri atas kepercayaan, jaringan, dan norma.

Modal yang dibutuhkan oleh aktor untuk bertarungan dalam setiap arena yang bukan hanya modal berupa uang atau benda berharga saja tetapi ada modal lain yang perlu dieksplorasi karena modal inilah yang juga menjadi faktor penentu untuk mendapat kekuasaan dan kemenangan dalam pemilihan legislative(pileg). Modal yang saya maksudkan disini adalah modal sosial. Modal sosial menyorot tentang hubungan individu dengan sesama. Sebuah hubungan yang dibangun dengan sesamanya agar dapat diterima oleh kelompoknya.

Menurut John Field, orang membangun hubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan dan menjadi sumber daya yang dapat dipandang sebagai modal.³ Pernyataan Field sudah cukup memberikan gambaran tentang modal sosial. Pernyataan di atas menunjukkan jaringan cukup berpengaruh dalam sebuah kerja sama dan dalam sebuah hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.

² Yusuf lubis ahyar 2014 post modernisme: teori dan metode PT. Raja grafindo persada, Jakarta Hal.123

³ Field, john Modal sosial. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.Hal.1

Kemudian ada tiga tokoh yang berperan dalam memperkenalkan tentang modal sosial antara lain:

Defenisi menurut Bourdieu mengatakan bahwa modal sosial adalah jumlah sumber daya aktual, atau maya yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan yang tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan atau pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan.⁴

Modal sosial sangat menunjang pada proses pencapaian karier seseorang dan menjadi aset yang berharga jika dibutuhkan seperti bagi Bourdieu erat dan tahan lama suatu ikatan vitalnya, Modal sosial merepresentasikan agregat sumber daya aktual dan potensial yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama. Ia pun mengakui bahwa nilai ikatan yang dijalin seseorang individu (volume modal sosial yang dimiliki agen tertentu) tergantung pada jumlah koneksi yang dapat mereka mobilisasi dan volume modal (budaya, sosial, dan ekonomi) yang dimiliki oleh masing-masing koneksi.⁵

Defenisi lain dari modal sosial dikemukakan oleh Coleman, Modal sosial adalah seperangkat sumber daya yang melekat pada hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial dan komunitas yang berguna bagi perkembangan kognitif atau sosial anak atau orang yang masih muda.

⁴ Ibid. Hal.23

⁵ Ibid. Hal. 25

Sumber-sumber daya tersebut berbeda lagi orang-orang yang berlainan dan dapat memberikan manfaat penting bagi anak-anak remaja dalam perkembangan modal modal sosial yang dimiliki.⁶

Bagian lain, ia mendefenisikan modal sosial dalam kaitannya dengan perkembangan anak sebagai norma, jaringan sosial, dan hubungan antar orang dewasa dan anak-anak yang sangat bernilai. Modal sosial ada di dalam keluarga, namun juga di luar keluarga, di dalam suatu komunitas.⁷

Dengan demikian, modal sosial bukan hanya bernilai dalam perolehan Ijazah namun juga dalam perkembangan kognitif dan evolusi kearah identitas diri yang mapan. Defenisi Coleman tentang modal sosial menghubungkan individu dan kolektif. Secara langsung ia melihat modal sosial sebagai aset yang bernilai bagi individu, namun melihatnya terbangun dari sumber- sumber tersebut dapat di praktikkan atau tidak. Coleman percaya bahwa dua elemen yang krusial yang berperan: batas-batas aktual kewajiban yang dijalankan dan level kejujuran lingkungan sosial. Pada gilirannya itu semua bersifat lebih spesifik menurut konteksnya, dan dibangun oleh variasi struktur sosial.

Robert D. Putnam (1993 :169) seorang ahli Ilmu Politik asal Amerika mendefenisikan Modal sosial sebagai *Features of Social Organisation, such as Trust, Norms, and Networks, than tan improve the efficiency of facilitating*

⁶ Ibid. Hal. 38

⁷ John field, Modal Sosial, London Routledge:2003. Hal.37

coordinated actions (Sesuatu karakteristik yang ada di dalam organisasi sosial, semisal kepercayaan, norma, dan jejaring yang bisa memperbaiki efisiensi masyarakat melalui memfasilitasi aksi-aksi yang terkordinasikan).⁸

Defenisi pertama Putnam ini disampaikan pada saat Putnam melakukan riset tentang tradisi politik di Italia. Artinya, partai politik akan menjadi partai yang besar, kuat, dan terus Berjaya, apabila bisa membangun tiga hal, yaitu kepercayaan, norma yang berlaku dan ditaati bersama, dan jejaring yang kuat. Pada tahun 1996, Putnam sedikit merevisi definisinya sebagai berikut fitur-fitur kehidupan sosial, semisal jejaring, norma, dan kepercayaan yang kesemuanya bisa digunakan oleh partisipan untuk berbuat bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.⁹

Defenisi Putnam tentang modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.¹⁰ Gagasan inti dari modal sosial adalah jaringan sosial yang memiliki nilai, kontak sosial yang mempengaruhi produktifitas individu dan kelompok.

⁸ John.Field, *Sosial Capital*, Roudledge, Canada, USA, 2008, hal.4

⁹ Ibid. Hal. 35

¹⁰ Ibid. Hal. 51

2.3. Arti Aktor dan Interaksinya dalam Arena Politik

Aktor berasal dari kata kerja Bahasa latin *Agree* yang berarti berbuat, melakukan” orang yang menumbuhkan, orang yang meletakkan dasar, perintis, pencipta, pengarang, merupakan asal-usul untuk kata inggris *author* “penulis”. Aktor mempunyai mempunyai arti yang lebih luas, pembuat atau pelaku. Berbicara mengenai politik tidak terlepas dari aktor, aktor di definisikan sebagai mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki posisi penting, aktor politik adalah manusia yang memposisikan dan diposisikan untuk bertindak yang pada tujuannya mulianya untuk membimbing warga negara menjadi lebih maju dan mandiri. Menurut Mc Nair, yang termasuk aktor politik adalah orang atau individu dalam sebuah organisasi politik, partai politik, organisasi public, kelompok penekan dan teoris. Sementara itu Nimmo menyebut bahwa kriteria aktor politik adalah orang yang bicara tentang politik atau dalam *setting* politik, seperti politikus, profesional, dan aktivis.

Posisi aktor dalam segenap aktifitasnya sebagai bagian dari interaksinya, merupakan petanda bahwa mereka menjalankan realitas kehidupannya dan merupakan bentuk umum proses sosial, oleh karena itu interaksi menjadi syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial menurut Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2007:55) merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan

antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.¹¹

Linz dan Stephan (1996) menyebutkan bahwa arena politik ditandai oleh hadirnya empat aktor utama: *pertama, the state* yang dalam berbagai literatur ditempatkan sebagai *public agency*. *Kedua, political society*, yang di dalamnya terdapat partai politik. *Ketiga, economic society*, yang selalu bergerak dalam logika-logika kapital dan pasar. *Keempat, civil society*, yang memiliki karakteristik keswadayaan (voluntarisme) dan mandiri dari pengaruh Negara.

Dengan meminjam kerangka Tornquist, Linz, Stephan, dan Diamond dalam studi ini memusatkan perhatian pada interaksi antar aktor dalam dua arena utama: *Pertama*, interaksi di arenanya masing masing (*micro politics*) *Kedua*, Interaksi antar aktor dalam arena yang lebih luas (*macro politics*). Salah satu arena penting yang bisa digunakan untuk melihat lebih jauh keterlibatan aktor-aktor dalam arena yang lebih luas adalah proses kompetisi politik dan pembuatan kebijakan publik.

Interaksi antar aktor juga berlangsung dalam arena kompetisi politik dimana aktor-aktor dalam masyarakat politik berkontestasi dalam merebut jabatan terpilih (*elected official*). Dalam proses kompetisi tersebut aktor politik (politisi dan partai politik) bertemu dan bersentuhan untuk membangun jaringan dengan masyarakat dengan memanfaatkan modal

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/3522/16/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 30/03/18

sosial. Sebagai akibatnya, arena Pemilihan Legislatif menjadi arena interaksi antar aktor di tingkat lokal.¹²

2.4. Teori Jaringan Aktor

(*Actor-network theory*) dan contagion teori jaringan aktor (ANT) dikembangkan oleh ilmuan studi ilmu pengetahuan dan teknologi studi terutama Michael Callon, Bruno Latour, dan John Law. Dalam teori jaringan aktor (ANT) terdapat aktor jaringan. Aktor adalah semua elemen yang terhubung dalam sistem yang nantinya akan membentuk jaringan secara alamiah¹³.

Terminology aktor dan jaringan dihubungkan sebagai upaya untuk memangkas perbedaan antara agensi dan struktur, sebuah posisi inti disebahagian besar sosiologi (disiplin ilmu lain). Perbedaan tersebut tidak dibutuhkan untuk teori ANT, sebab fenomena level makro disusun sebagai jaringan. Jaringan merupakan proses, bangun ragam aktifitas, dan diadakan oleh sejumlah aktan, dimana para aktan tersebut berbentuk dari jaringan. Ketika berbagai jenis aktan bersosiasi, berbentuk 'aktor-jaringan'. Konsep aktor jaringan bertujuan untuk menganalisis koneksi nyata, dalam arti bahwa aktor jaringan bukan entitas fix diluar sana, tetapi bisa di telusuri

¹² R. zuhro siti 2009 *DEMOKRASI LOKAL* peran aktor dalam demokratisasi *OMBAK* Yogyakarta Hal.22

¹³ Indria Wulandari, "(KAJIAN TEORI JARINGAN-AKTOR MICHAEL CALLON) indria Wulandari Abstrak", 4, 2017, 1-10.

secara fisik. Ide dibalik konsep aktor jaringan dimulai dengan melupakan level analisis dan mengeksplorasi apa yang sebenarnya terjadi.

ANT terdiri atas lima preposisi dasar: *aktor atau kelompok; peristiwa; jaringan; posisi; dan representasi*. Dua hal terakhir, yaitu posisi dan representasi lebih relevan dengan kajian antropologi atau sosiologi sosial, oleh karena itu tidak akan dibahas dalam tulisan ini. Fokus utama ANT adalah kritik terhadap konsep sosial, dan dalam konteks ini dapat diperlakukan juga sebagai kritik terhadap konsep budaya. Arkeologi selalu menyimpulkan bahwa artefak adalah *produk* suatu kebudayaan, dan dalam hal ini secara ontologis artefak disamakan dengan “masyarakat” (*society*) karena artefak dan masyarakat sama-sama merefleksikan norma dan nilai budaya. Teori sosial pada umumnya menjelaskan masyarakat sebagai produk dari sistem nilai, yaitu tataran abstrak yang mengikat individu-individu ke dalam organisme (Durkheim), fungsi (Parsons), atau struktur (Strauss). Sementara itu, pendekatan simbolisme dalam penafsiran arkeologi juga mengatakan bahwa artefak (budaya material) mencerminkan sistem nilai yang ada dalam masyarakat kuna pembuat artefak tersebut. Preposisi pertama ANT mengkritik pandangan tersebut dengan mengemukakan sudut pandang lain yang melihat masyarakat sebagai jaringan asosiasi, bukan semata-mata refleksi dari fungsi organisme atau nilai struktural. Apabila diterapkan dalam penafsiran arkeologis, preposisi pertama ANT ini dapat dipakai sebagai kritik terhadap pandangan bahwa artefak atau situs tidak memiliki agensi (*agency*) sendiri selain sebagai hasil

produksi manusia. Dalam kritik terhadap pandangan itu, ANT memperlihatkan kompleksitas budaya material sebagai mediator relasi politik, sosial, budaya, atau ekonomi, dan bahkan asosiasi antara manusia dan non-manusia (*non-human*). Artefak seperti roda kemudi kapal memediasi hubungan antara kapten kapal dengan anak buah kapal karena pengaturan akses terhadap kemudi kapal itu memperlihatkan struktur dan pola hubungan kerja di kapal. Kemudi kapal menjadi agensi dan aktor, karena tanpa adanya benda tersebut, hubungan kerja antara kapten dengan anak buahnya tidak bisa terjadi.

Preposisi kedua ANT tentang “peristiwa” adalah konsep terpenting dalam ANT. Selama ini teori sosial membedakan “peristiwa” dari “hasil peristiwa” tersebut: pot keramik adalah hasil dari orang membakar tanah liat di tungku; masyarakat adalah hasil kumpulan individu yang diikat oleh suatu norma atau struktur; penyakit adalah hasil virus yang menyerang manusia atau hewan. Teori sosial menarik garis perbedaan antara proses, yang selalu dilihat sebagai proses “sosial”, dengan obyek yang berupa benda material atau kesatuan sosial seperti masyarakat, grup etnis, atau kelompok agama. Dalam pandangan semacam ini, obyek adalah akibat dari peristiwa, dan hubungan antara obyek dengan peristiwanya bersifat satu dimensi, satu arah, dan bersifat sebab-akibat. Teori sosial klasik juga sering memperlakukan “hasil” tersebut sebagai sesuatu yang pasif, sekali terbentuk tidak berubah lagi. Teori tentang kelompok etnis dan kelompok agama adalah contoh terbaik tentang pandangan bahwa kelompok sosial adalah

kesatuan yang tidak berubah. Interpretasi arkeologi seringkali sejalan dengan pandangan ini, misalnya kesimpulan bahwa candi Hindu dibangun dan dimanfaatkan hanya oleh kelompok masyarakat Hindu. Ini adalah contoh hubungan satu dimensi antara budaya material (candi) dengan kelompok sosial (masyarakat Hindu).

ANT mengatakan bahwa kelembagaan atau bentuk material adalah konstruksi asosiatif sementara, oleh karena itu analisis sosial perlu mengubah pandangan mereka yang melihat material sebagai “hasil/produk” menjadi material sebagai “peristiwa” (*event*).^[6] Konstruksi sosial atau material (misalnya lembaga sosial atau artefak) adalah asosiasi yang aktif, selalu berada dalam relasi dengan aktor lain, dan proses relasi itu secara terus menerus mengubah posisi aktor atau elemen dalam asosiasi atau *assemblage* sosial maupun material tersebut. ANT menegaskan bahwa setiap bentuk konstruksi (sosial maupun material) selalu bersifat *precarious* (tak pasti) karena relasi yang aktif secara terus menerus akan mengubah “bentuk” menjadi “peristiwa.” “Bentuk” (*form*) hanya merupakan asosiasi atau *assemblage* sementara.

Memang tampaknya agak sulit bagi arkeologi untuk melihat “bentuk” sebagai peristiwa dan menelusuri *social precarity* (ketidakpastian sosial) karena analisis arkeologi dimulai melalui benda *non-human* berupa artefak, situs, atau ekofak. Namun hal itu bisa diatasi dengan mengubah cara pandang, dari cara pandang artefak sebagai “benda” menjadi artefak sebagai “proses *assemblage*”. Dalam konteks cara pandang ini, lapisan

assemblage yang tersusun menjadi artefak adalah lapisan peristiwa, sehingga tugas arkeologi adalah menemukan kembali relasi-relasi yang membentuk *assemblage* tersebut. Semakin kompleks atau rumit suatu artefak atau situs, semakin banyak asosiasi *assemblage* yang harus diurai untuk menelusuri peristiwa yang terjadi. Misalnya, asosiasi *assemblage* yang membentuk satu guci tempayan polos mungkin berbeda dengan asosiasi *assemblage* yang membentuk satu kapal lintas samudra. Namun perlu dimengerti bahwa kompleksitas asosiasi *assemblage* berbeda dengan kesulitan teknik pembuatan atau kerumitan desain. Guci tempayan polos mungkin saja memiliki kerumitan *assemblage* yang kompleks apabila misalnya tempayan itu dibuat oleh orang yang tinggal di tempat yang tidak tersedia bahan dasar tanah liat sehingga bahan tersebut harus didatangkan dari tempat yang jauh. Kerumitan *assemblage* kemudian terlihat dari kompleksitas jaringan perdagangan untuk mendatangkan bahan baku tersebut. Sebagai “peristiwa” (*event*), guci tempayan polos ini bisa memiliki asosiasi *assemblage* yang sama rumitnya dengan pembuatan kapal.

Preposisi ketiga ANT adalah tentang jaringan. Dalam teori sosial, jaringan dipahami semata-mata sebagai elemen pasif dalam hubungan antara dua aktor atau lebih yang masing-masing bersifat independen. ANT sebaliknya menegaskan bahwa jaringan itu harus bersifat aktif dan saling memengaruhi, jaringan memungkinkan satu agensi atau aktor melakukan sesuatu terhadap aktor lain yang terkait, dan juga memungkinkan aktor lain melakukan hal yang sama terhadap aktor pertama. Tidak ada jaringan

tanpa adanya hubungan saling memengaruhi tersebut. Salah satu titik penting dalam preposisi ini adalah pengertian bahwa jaringan memungkinkan seorang atau satu aktor berubah dalam relasinya dengan aktor lain. Dalam hal ini, pola dan arah jaringan pun akan berubah sejalan dengan aktor yang berubah. Hal penting yang juga ditegaskan oleh preposisi ANT tentang jaringan adalah perubahan aktor dapat memunculkan jaringan baru yang mungkin tidak terkait dengan aktor lama. Ibarat akar pohon, perubahan bisa memunculkan cabang akar baru yang tidak bisa diduga sebelumnya. Dalam ANT, jaringan selalu bersifat terbuka. Untuk arkeologi, preposisi ANT tentang jaringan ini bisa diterapkan dengan mempelajari keterlibatan artefak dalam lapisan-lapisan perilaku sosial atau perubahan posisi artefak atau situs dalam jaringan sosial.

Dalam kaitannya dengan perubahan posisi artefak dalam jaringan sosial ini, sebenarnya teori arkeologi sudah lebih dulu membahasnya sebelum ANT. Misalnya perubahan fungsi guci dari alat masak menjadi benda yang dipertukarkan sebagai cinderamata sampai menjadi wadah penyimpanan abu jenazah adalah contoh perubahan posisi artefak dalam jaringan sosial yang berbeda. Tetapi, ANT membuka wawasan baru ketika artefak dipahami sebagai budaya material yang memiliki sejarah asosiasi yang kompleks dan tugas arkeolog adalah menceritakan lapisan-lapisan sejarah asosiasi yang kompleks tersebut. Ambil contoh alat navigasi seperti kompas atau *sextant*. Dalam lapisan yang paling luas, alat navigasi kelautan ini adalah bagian dari sejarah rasionalisasi Barat ketika

penguasaan terhadap gejala alam diterjemahkan melalui ilmu pengetahuan astronomi dan fisika, terlepas dari ilmu pengetahuan yang dipakai oleh, misalnya, suku-suku maritim di Kepulauan Pasifik. Eduardo Viveiros de Castro dalam kajiannya tentang kosmologi di Amazon mengatakan kita tidak perlu memaksakan rasionalisasi Barat ke dalam kosmologi lokal, misalnya dengan mengatakan bahwa suku Trobriand juga *memiliki* ilmu astronomi. Castro menegaskan antropolog perlu memahami perspektif yang dipakai oleh suku-suku lokal untuk membaca gejala alam, termasuk di antaranya perspektif yang melibatkan unsur-unsur non-manusia, tanpa menerjemahkannya ke dalam ilmu pengetahuan Eropa. Contoh ini memperlihatkan bahwa alat navigasi kompas atau *sextant* merupakan bagian “kosmologi” terkait dengan pengetahuan astronomi yang dapat ditarik ke jaman Yunani. Dalam lapisan sejarah lain, asosiasi *assemblage* alat navigasi memunculkan pengetahuan tentang perspektif geografis yang membagi bumi menjadi empat kategori mata angin. Pengetahuan ini memperlihatkan kemunculan jaringan pengetahuan baru tentang konsep orientalisme dan oksidentalisme, yaitu pemahaman bahwa dunia itu terdiri atas peradaban oriental di timur dan peradaban oksidental di barat. Selain lapisan kosmologi dan pengetahuan tersebut, artefak kompas juga menunjukkan lapisan baru tentang prinsip efisiensi ekonomis dalam transportasi laut, karena kompas diperlukan untuk membantu perjalanan agar efisien dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi maksimal. Oleh karena itu, keberadaan kompas dapat mengindikasikan adanya

perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat yang ingin melakukan efisiensi ekonomis.

2.5. Strategi Politik Aktor

Menurut scolder (dalam Samad Umarama,2009:13) strategi politik adalah segala Tindakan terencana yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Kata strategi adalah turunan dari kata dalam Bahasa Yunani, *stragos*. Adapun *stragos* dapat di terjemahkan” komandan militer” pada zaman demokrasi athena. Menurut minitzberg (2007), konsep strategi itu sekurang kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah sesuatu:

- a.) Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang di tempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
- b.) Acuan yang berkenaan dengan penilain konsistensi ataupun inkonsistensi prilaku serta Tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- c.) Sudut yang di posisikan oleh organisasi saat memunculkan aktifitasnya.
- d.) Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkukngan yang menjadi batas bagi aktifitasnya.
- e.) Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengetahui para pesaing.

Secara termonologis, strategi politik dapat diartikan sebagai ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat untuk mencapai sesuatu yang

diinginkan (Prima Pena, 206:448). Dengan mengaitkan dengan istilah politik oleh Lasswell yang disimpulkan dengan masalah *Who, Gets what, When, how*, atau masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Artinya, adanya sesuatu usaha dan strategi persuasi politik suatu proses poliitik mengenai” siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (surbakti, 1992:7). Strategi politik berisikan upaya-upaya dalam bentuk persuasi politik. Persuasi politik melibatkan tujuan, suatu usaha komunikator untuk mencapai tujuan tujuan. Nimmo: 2005 menerangkan bahwa persuasi politik memiliki tiga cara berfikir utama yang terjadi dalam politik yaitu propaganda, Periklanan dan Retorik, serupa dalam beberapa hal semuanya bertujuan(purposif), disengaja(intensional), dan melibatkan pengaruh dan semua melibatkan hubungan timbal balik antara orang-orang.

Adapun upaya aktor dalam memaksimalkan potensi diri sebagai bagian dari strateginya adalah:

2.5.1. Memaksimalkan Survei dalam upaya mengenali suara Pemilih

Survei politik adalah hal yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Perkembangan survei politik berasal dari beberapa aliran, Pertama, pendekatan yang mempelajari tentang studi manusia.

1. Mazhab Chicago, yang dipelopori Herbert Blumer, melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan George Herbert Mead. Blumer meyakini bahwa studi manusia tidak bisa dilakukan dengan cara sama seperti penelitian pada benda mati. Seorang peneliti harus empati pada pokok materi, terjun langsung pada pengalamannya,

dan berusaha untuk memahami nilai dari tiap orang. Blumer menghindari kuantitatif dan statistik dengan melakukan pendekatan ilmiah melalui riwayat hidup, otobiografi, studi kasus, buku harian, surat, dan nondirective interviews. Penekanan pentingnya ada pada pengamatan peneliti. Lebih lanjutnya, tradisi Chicago melihat manusia sebagai kreatif, inovatif, dalam situasi yang tak dapat diramalkan. Masyarakat dan diri, dipandang sebagai proses, bukan sebagai struktur untuk membekukan proses atau menghilangkan intisari hubungan sosial.¹⁴

2. Mazhab Lowa, yang mengambil lebih dari satu pendekatan ilmiah. Tokohnya adalah Manford Kuhn, salah satu karyanya adalah teknik pengukuran yang terkenal dengan sebutan *Twenty Statement Self-Attitude Test* (konsep pengujian sikap diri melalui dua puluh pertanyaan). Dua di antaranya adalah *ordering variable*, yaitu menyatakan kepentingan yang relatif menonjol yang dimiliki individu dan *locus variable*, yaitu menyatakan perluasan tendensi yang secara umum dilakukan individu dalam mengidentifikasi kelompok konsensual.¹⁵ Penilaian dari tes tersebut adalah dengan meletakkan pernyataan tersebut dalam dua kategori, konsensual dan subkonsensual. Pernyataan dianggap konsensual jika ia mengandung indentifikasi kelas atau golongan; sedangkan jika

¹⁴ Dadi Ahmadi. "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar". Mediator Vol. 9 No. 2. Desember 2008. Hal. 301

¹⁵ Ibid. Hal. 301

mengandung indentifikasi yang mengarah ke kualitas tertentu, maka ia merupakan pernyataan subkonsensual. Kuhn berusaha mengembangkan konsep tentang diri (*self*) menjadi lebih konkret. Konsep yang lainnya tentang perencanaan tindakan (*plan of action*) yaitu pola tingkah laku seseorang terhadap objek, karena perencanaan diarahkan oleh sikap, yaitu pernyataan verbal yang menunjukkan nilai tujuan tindakan maka sikap dapat diukur. Konsep diri menyangkut perencanaan tindakan individu terhadap dirimeliputi: identitas, kepentingan dan hal yang tidak disukai, tujuan, ideologi, dan evaluasi diri.¹⁶

Tidak ada catatan jelas kapan survei politik atau *poll* dilakukan pertama kali, khususnya dalam peradaban demokrasi modern. Catatan tertua tentang survei menjelang Pemilu adalah yang terjadi pada tahun 1824 dan dilakukan oleh *The Aru Pennsylvanian* (beberapa sumber menyebutnya *The Harrisburg Pennsylvanian*) di Amerika Serikat (AS). Survei tersebut menyebutkan Andrew Jackson akan memenangkan Pilpresmelawan John Quincy Adams di tahun tersebut. Saat itu, hasil survei sesuaidengan hasil pemilu, sehingga meningkatkan popularitas *pollster* di tahun-tahun berikutnya.¹⁷

Lalu, pada tahun 1916, survei yang lebih menyeluruh dilakukan oleh *The Literary Digest*. Tapi pada tahun 1936, *Digest* melakukan

¹⁶ Ibid. Hal. 302

¹⁷ <https://pinterpolitik.com/sengkarut-tarot-lembaga-survei/> diakses pada 10 September 2019

kesalahan survei dalam memprediksi calon yang menang pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat. *Digest* tutup pada 1938 akibat kesalahan tersebut.¹⁸ Fakta tersebut menegaskan bahwa melakukan survei politik adalah proses ilmiah yang tidak boleh sedikitpun melakukan kesalahan.

Sampai saat ini, survei politik menjadi suatu kesatuan dalam profesi konsultan politik. Hampir semua perusahaan atau lembaga yang menawarkan jasa konsultan politik, juga menawarkan jasa survei politik. Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat maupun kandidat kepada lembaga survei sekaligus lembaga konsultan politik berdasar pada tingkat presisi hasil surveinya. Melalui hal itu pentingnya survei politik menjadi bagian dari persuasi aktor politik atau pun kelompok untuk melakukan upaya persuasi politik untuk memenuhi eksistensi yang berkelanjutan.

2.5.2. Memaksimalkan Potensi diri melalui analisis SWOT untuk mengenali kemampuan aktor

Salah satu metode untuk mencapai tujuan dari strategi politik sesuai target adalah menerapkan Analisa SWOT. Dalam dunia *marketing*, Albert Humphrey membuat teknik atau metode yang bernama *SWOT Analysis* atau Analisa SWOT. Metode ini digunakan dalam strategi bisnis agar perusahaan atau organisasi bisnis berjalan sesuai visi yang telah ditentukan. Mengutip Wikipedia, SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*),

¹⁸ Ibid

kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). SWOT akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek.¹⁹

Ege dan Gor dalam jurnalnya menerangkan bahwa Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk perencanaan strategis dan manajemen strategis dalam organisasi. Dapat digunakan secara efektif untuk membangun strategi organisasi dan strategi kompetitif. Sesuai dengan pendekatan sistem, organisasi adalah suatu keutuhan yang berinteraksi dengan lingkungan dan terdiri dari berbagai sub-sistem. Dalam pengertian ini, sebuah organisasi ada di dua lingkungan, satu berada di dalam dirinya sendiri (*internal*) dan yang lainnya di luar (*external*). Dua faktor ini adalah sesuatu yang harus dipahami untuk menganalisis dua lingkungan ini untuk praktik manajemen strategis. Proses memeriksa organisasi dan lingkungannya disebut Analisis SWOT.²⁰

Analisis SWOT merupakan suatu kerangka kerja perencanaan strategis yang digunakan dalam mengevaluasi suatu organisasi, rencana, proyek atau kegiatan bisnis. Oleh karena itu Analisis SWOT adalah alat yang signifikan dalam menganalisis situasi guna membantu para manajer

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT diakses pada 8 September 2019

²⁰ Ege & Gör Ögr, "SWOT Analysis: A Theoretical Review". The Journal Of International Social Research. Vol. 10. No. 51. Agustus 2017. Hal. 995

dalam mengidentifikasi faktor-faktor organisasi dan lingkungan. Analisis SWOT memiliki dua faktor: Internal dan eksternal. Faktor *internal* dari Analisa SWOT ini terdiri dari *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), sedangkan faktor *external* terdiri dari *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman).²¹

Metode Analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 (empat) sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah:²²

1. Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (*opportunities*) yang ada.
2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan.
3. Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada.
4. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Dalam *marketing* politik, Analisa SWOT ini juga bisa diterapkan dalam pemilihan kepala daerah, terutama dalam dunia konsultan politik yang ingin memenangkan kandidat yang didampinginya. Konsultan perlu

²¹ Ibid. Hal. 995

²² <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-manfaat-faktor-yang-memengaruhi-dan-contoh-analisis-swot/> diakses pada 8 September 2019

menganalisa kekuatan dan kelemahan kandidat, guna mengambil keuntungan dari sebuah peluang, serta mengatasi sebuah ancaman.

Selain digunakan dalam sebuah organisasi, Analisis SWOT juga dapat melihat potensi yang dimiliki diri sendiri, baik dalam sebuah organisasi dan perorangan sebagai suatu refleksi diri dengan menggunakan strategi. Melalui laporan mengenai SWOT, maka bisa diketahui penjelasan analisis diri sendiri. Dimana akan dibahas secara terperinci dengan saran yang akan digunakan sebagai strategi dari jawaban dari analisis SWOT. Untuk metode ini, yang menjadi obyek utamanya adalah diri sendiri. Dimana akan dijabarkan mengenai analisis dari hasil penilaian secara subyektif yang belum tentu orang lain hasilkan analisis yang sama.

Untuk menjalankan metode analisis SWOT diri sendiri, bisa dengan mengelompokkan dua kategori yang paling utama berdasarkan sumbernya. Sumber yang pertama adalah internal yang memiliki sumber untuk bisa mengetahui mengenai kekuatan serta kelemahan yang melekat pada diri sendiri. Sedangkan sumber yang kedua berasal dari faktor eksternal yang didapatkan dari mengetahui peluang serta ancaman yang bisa berasal dari lingkungan sekitar. Sebagaimana penjelasan diatas, untuk bisa mengenal diri sendiri, maka dibutuhkan empat faktor meliputi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman.

2.6. Kerangka Pemikiran

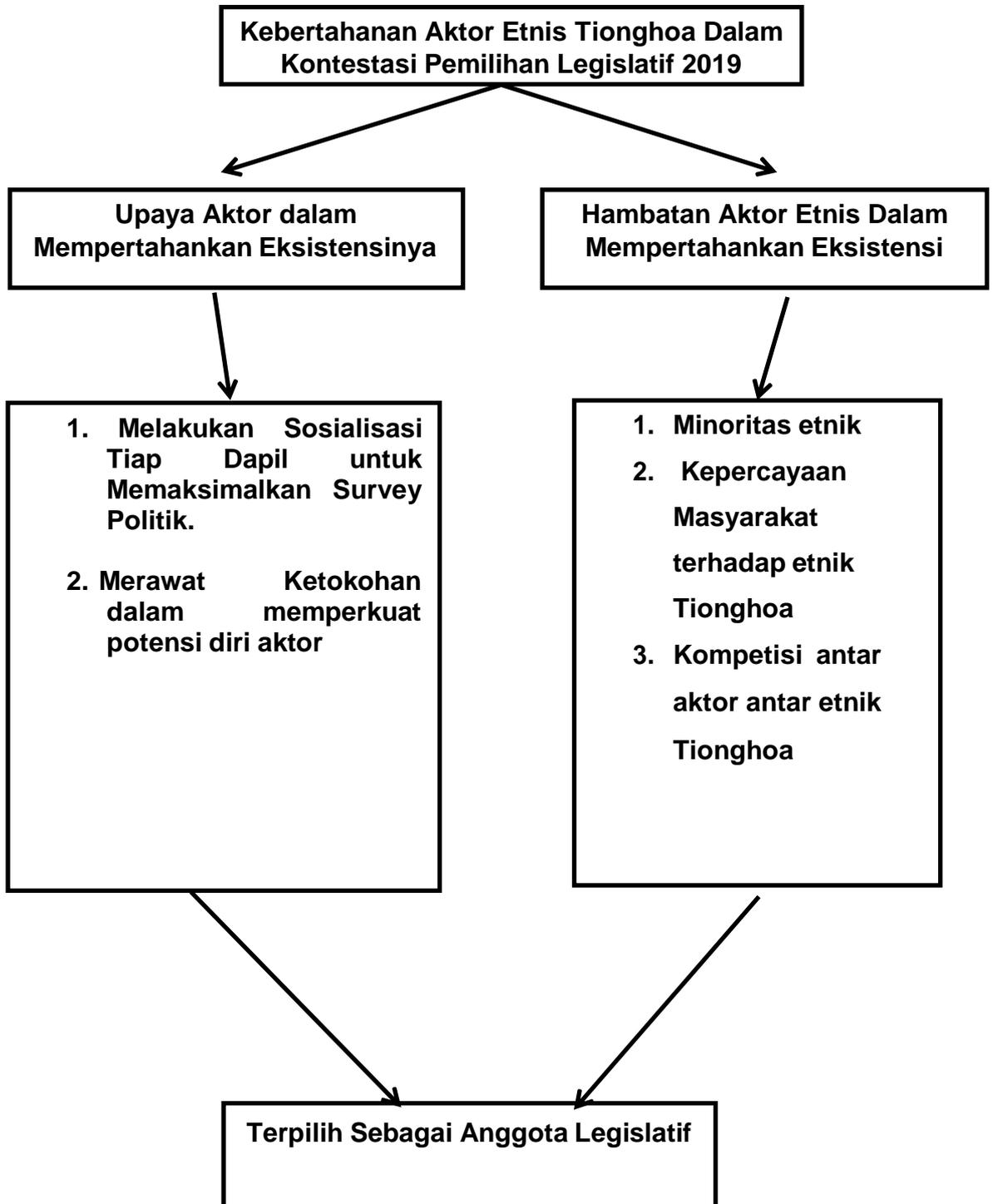
Pada konteks pemilihan legislatif di kota Makassar pemilih dapil 1 dan dapil 2 selalu melahirkan representasi calon dari etnis tionghoa, salah satunya adalah Eric Horas yang maju melalui partai Gerindra yang dimulai pada awal pemilu 2014 bersama saudaranya Edward Horas, pada pemilihan legislatif saat itu keduanya terpilih menjadi anggota DPRD, dimana hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Erik Horas terpilih sebagai anggota DPRD kota Makassar dan saudaranya Edward horas juga terpilih sebagai anggota DPRD provinsi pada wilayah pemilihan yang sama yaitu kota Makassar.

Penelitian ini berorientasi untuk menggambarkan bagaimana aktor etnis memaksimalkan potensinya dalam mendulang suara pada pemilihan legislatif di Kota Makassar, termasuk bagaimana upaya mereka mampu bertahan dengan calon lainnya diluar etniknya. Hal ini sebagai bentuk harapan masyarakat etnis tionghoa kepada aktor tersebut, yang memperoleh kursi di DPRD Kota Makassar dan provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam upaya mempertahankan eksistensinya, juga terdapat hambatan yang dialami oleh aktor Tionghoa. Salah satu hambatan yang paling mendasar adalah konflik horizontal antar etnis pada tahun 1998 yang membuat etnis tionghoa menjadi kelompok masyarakat termarjilkan dari kelompok masyarakat lainnya di kota Makassar. Selain itu, tentunya terdapat beberapa hambatan yang membuat perolehan suara etnis Tionghoa mengalami pasang surut di pemilihan legislatif kota Makassar.

Strategi Politik yang dilakukan oleh aktor Tionghoa dalam upaya mempertahankan Eksistensinya adalah dengan memaksimalkan survei politik untuk mengenali suara pemilih dan Memaksimalkan Potensi Diri melalui analisis SWOT. Melalui hal itu pentingnya survei politik menjadi bagian dari persuasi aktor politik untuk melakukan upaya persuasi politik untuk memenuhi eksistensi yang berkelanjutan sedangkan penggunaan analisis SWOT dalam tulisan ini untuk mengetahui *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) sehingga dapat menganalisa kekuatan dan kelemahan kandidat, guna mengambil keuntungan dari sebuah peluang, serta mengatasi sebuah ancaman.

Skema Pemikiran



2.7. Penelitian Terdahulu

Terkait judul penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis. Yang pertama, dalam tesisnya yang berjudul Orientasi Politik Etnis Tionghoa di Kota Makassar, namun hal yang membedakan pada penelitian yang terdahulu yaitu pada penelitian ini berfokus bagaimana aktor etnis Tionghoa mempertahankan eksistensinya pada kontestasi pemilu legislatif di kota Makassar pada periode tahun 2014 hingga 2019 yang terimplikasi menjadi sebuah kebertahanan aktor etnis pada pemilu 2019 Kota Makassar.

1. Ovi Amalia Sari, dkk., (2017) berjudul “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006-2012” Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Data penelitian ini bersumber dari KIP Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh Kecamatan Kuta Alam Gampong Peunayong, partai politik, dan etnis Tionghoa dalam konteks partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2006-2012. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwa, bentuk partisipasi etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada Pemilukada tahun 2006 dan 2012 termasuk dalam bentuk konvensional. Pada Pilkada tahun 2006 bentuk partisipasi politik

yang dilakukan etnis Tionghoa hanya satu bentuk partisipasi politik yaitu pemberian suara (voting). Sedangkan pada Pemilu pada tahun 2012 bentuk partisipasi politik etnis Tionghoa meningkat menjadi lima bentuk partisipasi politik yang terdiri dari pemberian suara (voting), penetapan daftar pemilih, membicarakan masalah politik, mengikuti kampanye, menjadi saksi pada penghitungan suara. Faktor pendorong partisipasi politik Etnis Tionghoa pada Pemilu Kota Banda Aceh tahun 2012 yaitu faktor kesadaran politik dan rasa ingin tahu, sedangkan faktor penghambat partisipasi politik yaitu faktor kesibukan kegiatan sehari-hari dan anggapan belum ada kemampuan.

2. Isfandi (2017), meneliti tentang "Tingkat Efektivitas Sosialisasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam Pemilihan Kepala Daerah Periode 2017-2022; Studi Penelitian terhadap Etnis Tionghoa di Peunayong Kota Banda Aceh". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Semua data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan-informan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh

KIP Kota Banda Aceh terhadap warga etnis Tionghoa masih tidak efektif dan kurang maksimal dengan melihat ada beberapa faktor yang menjadi penghambat hal tersebut. KIP Kota Banda Aceh diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga etnis Tionghoa. Bentuk sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada warga etnis Tionghoa yaitu pertama, KIP Kota Banda Aceh seharusnya membentuk tim Relawan Demokrasi yang dapat memberikan sosialisasi khusus kepada warga etnis Tionghoa. Kedua, KIP Kota Banda Aceh harus mengagendakan jadwal sosialisasi khusus sejak pra pemilihan kepala daerah. Ketiga, KIP Kota Banda Aceh seharusnya menyasar atau mendatangi langsung kawasan berbasis etnis Tionghoa dan melakukan sosialisasi dalam bentuk pawai.

3. Maghfira Faraidiany (2015), berjudul "Politik Identitas Etnis di Indonesia; Suatu Studi terhadap Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan tentang politik identitas masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan. Hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa politik etnis lebih efektif digunakan untuk menarik perhatian masyarakat jauh sebelum pelaksanaan pemilu, karena politik etnis lebih bersifat kasat mata dari pada politik uang. Politik uang atau politik perut adalah

suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang merupakan salah satu pelanggaran kampanye. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian baik berupa uang, sembako (minyak, beras, dan gula) yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kinerja anggota DPRD yang berasal dari etnis Tionghoa di lembaga legislatif tersebut memiliki hubungan erat terhadap tingkat kesejahteraan etnis yang mereka wakili, dimana masyarakat lebih dituntun untuk menentukan pilihan karena ikatan identitas etnis tertentu dengan salah satu calon. Masyarakat diberi pandangan bahwa kepentingan masyarakat hanya akan dapat dipenuhi apabila masyarakat tersebut memilih pasangan yang berasal dari etnis yang sama dengan pemilih tersebut.

4. Ety Gustin Merdeka Waty (2016), dengan judul skripsinya “Orientasi Politik Etnis Tionghoa di Kota Makassar”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskripsi-analisis dimana tipe penelitian ini secara jelas mencoba menggambarkan secara jelas bagaimana orientasi politik etnik dalam dinamika politik pemilihan di kota Makassar, dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara langsung dengan sasaran penelitian untuk

memahami secara mendalam terkait perilaku etnis, dan kondisi lapangan. Hasil penelitian di atas menunjukkan orientasi politik dari etnis Tionghoa terbentuk karena adanya kepentingan etnis Tionghoa dalam menjalankan kegiatan interaksi sosial. Masyarakat etnis Tionghoa sendiri ikut berpartisipasi dalam tiap proses politik yang masing-masing momentumnya berbeda pula bahwa adanya hubungan timbal balik antara politik dengan etnisnya yang kemudian kesadaran tersebut diarahkan dalam area politik dalam bentuk kesadaran individu maupun kelompok (etnis Tionghoa). Sebaliknya masyarakat pemilih yang terbagi berdasarkan kelompok etnis menilai kandidat tersebut dan memberikan dukungannya. Generasi muda masyarakat Tionghoa yang berupaya bangkit hidup bersejajar dengan warga pribumi lainnya baik dalam ekonomi maupun politik, dengan mencoba mengalahkannya traumatik masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa berusaha sejalan dengan keinginan masyarakat pribumi, untuk memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan hati nurani.

5. Dian Festianto, (2020) Politik Peranakan Tionghoa Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan modalitas peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus bersifat deskriptif analitis. Konsep modalitas dari Bourdieu penulis

gunakan sebagai kerangka analisis. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan politisi peranakan Tionghoa sebagai informan kunci dengan menggunakan teknik purposive sampling dan tim sukses sebagai informan tambahan. Pengolahan data penelitian menggunakan metode triangulasi untuk menjamin reliabilitas, validitas, dan generalibilitas. Hasil penelitian menunjukkan politisi peranakan Tionghoa melakukan konversi modal sosial dan modal ekonomi menjadi modal politik ke dalam tiga ranah secara bersamaan, yang pada akhirnya menghantarkan mereka menduduki jabatan politik baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun kepala daerah. Fenomena demokratisasi lokal di Kabupaten Belu memiliki dua implikasi. Pertama; kondisi masyarakat lokal masih tradisional, berpendidikan rendah dan relatif miskin dan belum memiliki orientasi politik yang jelas cenderung mudah dimobilisasi oleh para politisi. Kedua, pada saat yang bersamaan partisipasi peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral telah mewujudkan representasi politik substansi, karena kelompok minoritas terwakili dalam sistem politik formal. Untuk itu, regulasi tentang pembatasan biaya kampanye dan sanksi berat bagi politisi yang melakukan praktek pembelian suara sangat diperlukan guna mendukung penguatan substansi demokrasi di ranah lokal.